

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYELESAIAN PERSELISHAN BATAS DESA
(Studi Kasus: Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon
Kec. Lengkiti Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2023)**

**Oleh
APRIANA SATRIA WIRA DARMA**

ABSTRAK

Masalah batas wilayah menjadi problematika didalam tata kelola pemerintahan Indonesia salah satunya batas antara Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon yang berada di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelesaikan perselisihan batas Desa yang terjadi di Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan Pendekatan Studi kasus, data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi *stressing* penelitian dilihat dari aspek peran pemerintah sebagai Fasilitator dan Regulator, pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 06-28 Oktober 2023. Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai fasilitator telah memfasilitasi mediasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki tetapi belum maksimal, karena terkendala ego sektoral Pemerintah Desa Sukaraja & Pemerintah Desa Gedung Pekuon, adapun peran pemerintah sebagai regulator telah berjalan tetapi belum optimal, karena pemerintah belum mengatur kemufakatan sehingga belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai bentuk penyelesaian perselisihan. Demi menyelesaikan perselisihan batasdesa, maka pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui otoritas yang dimiliki harus menggunakan seluruh wewenangnya dengan mempertimbangkan peta marga dan/atau membuka kembali dokumen tentang pembentukan Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati terkait batas desa sehingga tercapainya penyelesaian perselisihan batas desa.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perselisihan Batas Desa

**ANALYSIS OF THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT
IN RESOLVING VILLAGE BOUNDARY DISPUTES
(Case Study: Sukaraja Village and Gedung Pekuon Village, Lengkiti District,
Ogan Komering Ulu District, 2023)**

**By
APRIANA SATRIA WIRA DARMA**

ABSTRACT

The issue of regional boundaries was problematic in government governance in Indonesia, one of which was the boundary between Sukaraja Village and Gedung Pekuon Village in Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency. This research was intended to find out the role of the Regional Government of Ogan Komering Ulu Regency in resolving village boundary disputes that occurred in Sukaraja Village and Gedung Pekuon Village. This type of research was qualitative with a case study approach; data was obtained through observation, interviews, and documentation. As for the research stress, it could be seen from the aspect of the government's role as a facilitator and regulator. The research was conducted from 06-28 October 2023. Based on the results of data processing, it was known that the role of the regional government of Ogan Komering Ulu Regency as a facilitator had facilitated mediation in accordance with the authority it had but was not optimal because it was hampered by the sectoral ego of the Sukaraja Village Government and the Gedung Pekuon Village Government. Meanwhile, the government's role as a regulator had been running but was not yet optimal because the government had not regulated a consensus, and a Regent's Regulation had not been issued as a form of dispute resolution. To resolve village boundary disputes, the regional government of Ogan Komering Ulu Regency, through its authority, had to use all its authority by considering clan maps and/or reopening documents regarding the formation of Sukaraja Village and Gedung Pekuon Village for the further issuance of Regent Regulations regarding village boundaries so that settlement could be achieved in village boundary disputes.

Keywords: Government Role, Village Boundary Disputes